PROSPEK KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN

Yovinus

Abstract

Opportunities and challenges in today's era of globalization also affect the relationship between Indonesia and Malaysia. As the two allied countries which have a sea and land borders, there are many issues that arise as a result of interaction between citizens of both countries and the issue of political and teritorial issues which sometimes led to tensions between the two countries. In spite of it all there is another problem that is actually more substansial and that is people welfare. Commonly the border region can be regarded as disadvantaged areas, and most of its inhabitants live in poverty. This indicated the failure of both governments take advantage of the potential of natural resources and human resources as well as the geographical conditions that actually have great potential to inprove the well-being of border residents. However, with a good cooperation and mutual benefit in the future pattern of the pattern of bilateral cooperation has a great opportunity in order to improve the welfare of society.

Key Words: Bilateral Cooperation, People Welfare, Border Residents

Pendahuluan

Kecenderungan globalisasi dan desentralisasi tentu telah dan akan membawa banyak perubahan bagi Indonesia dan Malaysia. Berbagai isu yang muncul di masing-masing negara yang terkait dengan kecenderungan di atas adalah masalah pembangunan ekonomi, sumber daya manusia dan isu pendidikan serta isu dan

permasalahan politik, hukum dan budaya. Tidak terlepas dari isu – isu utama tersebut adalah bagaimana kedua negara serumpun tersebut dapat menjawab berbagai tantangan globalisasi dan desentralisasi guna mewujudkan kemakmuran bersama (Alisjahbana, Arminda S. dkk, 2007).

Terkait pembangunan dan kesejahteraan, berbagai konsep kerjasama dua negara telah digulirkan dengan berbagai kesepakatan dan saling pengertian seperti halnya dalam Sosek-Malindo, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), forum kerjasama kawasan (Masyarakat Ekonomi *Association of South East Asia Nations* (ASEAN)/MEA). Meski demikian, berbagai permasalahan dan tantangan juga muncul seiring dinamika sosial, kawasan dan persinggungan kepentingan serta kedaulatan kedua negara. Dalam beberapa hal, pihak Indonesia kerap merasa dirugikan atas manuver Malaysia terhadap wilayah-wilayah privat kedaulatan Indonesia seperti klaim Malaysia atas wilayah yang secara historis dan geografis adalah milik Indonesia (Sipadan-Ligitan), dugaan pergeseran patok batas wilayah yang disinyalir dilakukan secara sengaja oleh pihak Malaysia, klaim terhadap beberapa produk kebudayaan Indonesia, persoalan perlindungan tenaga kerja migran asal Indonesia, protes Malaysia atas bencana kabut asap yang berimbas terhadap wilayah Malaysia (meskipun dalam beberapa kasus kebakaran hutan di Indonesia juga melibatkan para pengusaha perkebunan Malaysia) dan lain-lain.

Tulisan ini secara khusus akan menyoroti dinamika hubungan bilateral Indonesia – Malaysia dalam beberapa aspek, dan pada akhirnya ingin melihat “celah” bagi prospek kerjasama

kedua negara khususnya di wilayah perbatasan di tengah pasang surut hubungan diplomatik kedua negara. Sejauh ini, kerjasama yang dibangun oleh kedua negara masih berkutat pada hal-hal yang bersifat makro, dan seringkali "berhati-hati" dalam membangun kesepahaman dalam lingkup kesejahteraan bersama. Faktor historis konfrontasi kedua negara pada era pemerintahan Orde Lama tampaknya masih cukup membekas, dan kadangkala timbul riak-riak di wilayah Indonesia jika terjadi persoalan diplomatik di antara kedua negara. Wilayah perbatasan kedua negara terutama di kawasan Sabah dan Sarawak adalah area konflik yang masih menyimpan memori buruk bagi hubungan kedua negara serumpun ini. Di pihak lain, persoalan ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan di wilayah perbatasan masih jauh tertinggal jika dibanding wilayah-wilayah inti atau pusat-pusat kota. Ini merupakan fakta mirisnya nasib warga perbatasan kedua negara yang sesungguhnya menyimpan potensi besar, baik sumber daya alam maupun manusia bagi peningkatan kualitas kesejahteraan dalam semangat keserumpunan.

Globalisasi ekonomi khususnya di kawasan Asia Tenggara (MEA), pada akhirnya juga mempengaruhi dinamika perekonomian di kawasan perbatasan. Hal ini ditambah lagi dengan perhatian pemerintah yang sejauh ini telah mengambil langkah-langkah konkrit bagi pembangunan kawasan perbatasan. Sepanjang Tahun 2016-2017, presiden Joko Widodo telah meresmikan beberapa pos lintas batas antar negara diantaranya di perbatasan Badau-Lubuk Antu (Kabupaten (Kab.) Kapuas Hulu Kalbar), Sajingan – Aruk (Kab. Sambas Kalbar) dan modernisasi pol lintas batas di Entikong

di Kab. Sanggau. Berbagai program pembangunan tersebut menandakan membaiknya kinerja pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan. Selain itu, berbagai peluang ekonomi dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraanpun akan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan karena mobilitas manusia dan barang akan teradministrasi dengan baik dan akan berdampak baik pula terhadap kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Terlepas dari pasang surut dinamika politik, sosial dan diplomatik di antara kedua negara, komitmen untuk mensejahterakan warga perbatasan telah terwujud dalam pembangunan pos lintas batas di perbatasan kedua negara. Terhambatnya pembangunan pos lintas batas di antara kedua negara pada masa lalu salah satunya disebabkan oleh belum sinkronnya kesepakatan untuk membuka jalur transportasi di perbatasan darat kedua negara, karena realisasi pembangunan pos lintas batas hanya akan terwujud jika kedua negara telah memiliki komitmen dan kebijakan bersama di antara kedua negara karena menyangkut aspek pembangunan fasilitas di pos perbatasan di wilayah masing-masing. Ini merupakan langkah awal yang baik bagi pengembangan kerjasama kedua negara dalam aspek-aspek lain. Sebagai dua negara yang serumpun, hendaknya semangat kekeluargaan dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membangun perbatasan sebagai “zona kemakmuran bersama.”

Kesenjangan Pembangunan dan Dilema Kemiskinan Warga Perbatasan

Bangun (2014) mengungkapkan bahwa pada level lokal, permasalahan yang dihadapi oleh warga perbatasan berupa keterisolasian, keterbelakangan, kemiskinan, mahalnya harga barang dan jasa, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta penyebaran penduduk yang tidak merata. Pada level nasional permasalahan yang dihadapi oleh daerah perbatasan antara lain, berupa kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada daerah perbatasan, serta kurangnya personil, anggaran fasilitas dan kesejahteraan; terjadinya perdagangan lintas batas ilegal, kurangnya akses serta media komunikasi serta informasi dalam negeri, serta belum optimalnya komunikasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam pananganan wilayah perbatasan. Sementara pada level internasional/regional, persoalan wilayah perbatasan muncul sebagai akibat lemahnya lobi dan kreativitas pemerintah di tingkat nasional. Berbagai peluang yang ada baik di kawasan ASEAN dan juga pembangunan nasional ternyata tidak bisa terangkai dengan baik bagi upaya pemenuhan hak ekonomi masyarakat. Berbagai kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan khususnya antara Malaysia dan Indonesia, masih belum terperhatikan sebagaimana mestinya.

Dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah, telah diupayakan dalam pelaksanaan otonomi daerah (Otda) dengan mempertimbangkan kemampuan pembangunan daerah yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pembangunan

masih diperlukan perhatian yang lebih besar khususnya kepada daerah yang terbelakang, daerah yang padat, dan daerah yang sangat kurang penduduknya, daerah transmigrasi, daerah terpencil, daerah perbatasan. Hal tersebut sudah tercantum sejak masih diberlakukannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkelanjutan, berhasil guna dan berdaya guna pada setiap tingkatan pemerintahan. Pelaksanaan pembangunan daerah diupayakan sesuai dengan potensi dan prioritas daerah yang bersangkutan (Budianta, 2010).

Sejak dahulu hingga zaman teknologi dewasa ini, wilayah perbatasan negara masih saja menjadi halaman paling belakang di negeri ini, meski banyak deklarasi yang menyatakan bahwa kawasan perbatasan merupakan beranda terdepan sebuah negara. Dalam kenyataannya belum terlihat adanya pembenahan-pembenahan yang berarti dari pemerintah, bahkan sejauh ini proses pembangunan masih dirasakan sangat lambat dan jalan di tempat. Masalah-masalah yang melanda seolah tanpa solusi, seperti misalnya masalah kemiskinan yang kian membelenggu masyarakat perbatasan yang mendiami wilayah perdesaan. Kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Bababang Kalimantan Barat masih ditandai dengan keterisolasian wilayah, keterbelakangan ekonomi dan sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, maraknya pekerja ilegal (*illegal workers*) serta menjamurnya praktikperdagangan manusia (*human trafficking*). Praktik perdagangan ilegal di wilayah perbatasan ini

memang sangat sulit terdekteksi oleh aparat keamanan perbatasan negara. Hal ini dikarenakan banyaknya jalur tikus untuk aksi penyelundupan, baik itu barang-barang ilegal maupun praktik penyelundupan manusia (Niko, 2016).

Dalam konteks negara, wilayah perbatasan melingkupi daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan dengan wilayah terirorial negara tetangga, sedangkan dalam konteks administrasi, wilayah perbatasan lebih diartikan sebagai bagian dari suatu wilayah administrasi tertentu yang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi lain di sekitarnya dalam kerangka Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI). Kedua tipe wilayah perbatasan tersebut merupakan wilayah integral pelaksanaan pembangunan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk lebih memeratakan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan ke seluruh pelosok negara. Dalam rangka pengurangan ketimpangan wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional) tahun 2004-2009 (Peraturan presiden/Pepres No. 7/2005) telah mengamanatkan bahwa pengembangan daerah tertinggal termasuk wilayah perbatasan terintegrasi dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi, melalui keterkaitan mata rantai proses produksi dan distribusi antara wilayah-wilayah tertinggal dengan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh (Budianta, 2010).

Potensi Kerjasama Sosial dan Ekonomi di Wilayah Perbatasan

Pembangunan ekonomi dan infrastruktur merupakan program strategis yang dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain seperti Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam konteks ini, pemerintah pusat mesti responsif dan menyederhanakan sistem birokrasi secara khusus di wilayah perbatasan. Hal ini terkait dengan banyaknya kewenangan dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah terutama dalam kerjasama dengan pemerintah Malaysia. Ketertinggalan kawasan perbatasan memang perlu untuk diselesaikan dalam sebuah kebijakan yang terpadu antar sektor, hal ini agar tidak terjadi tumpang tindih antara pemerintah pusat, daerah, aparat TNI dan masyarakat lokal yang kesehariannya menggantungkan hidupnya dari aktivitas-aktivitas yang saling berinteraksi dengan warga Malaysia.

Berkaca dari peningkatan sektor ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan Entikong dimana pos lintas batas transportasi antar negara yang dibangun pada tahun 1990, titik-titik perbatasan lain juga perlu untuk dibenahi. Di Kalimantan Barat secara administratif terdapat 5 Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kelima wilayah tersebut adalah Kabupaten Sanggau, Bengkayang, Sambas, Sintang dan Kapuas Hulu. Dari keseluruhan wilayah tersebut, baru Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong yang telah menjalankan fungsi keimigrasian secara penuh. Padahal beberapa wilayah seperti Sintang dan Bengkayang juga memiliki garis perbatasan yang

cukup panjang. Hal ini menyebabkan kondisi masyarakat di perbatasan Kabupaten Sintang dan Bengkayang belum sepenuhnya memiliki akses resmi untuk melaksanakan berbagai aktivitas termasuk perekonomian. Hal ini turut berkontribusi dalam meningkatnya berbagai aktivitas ilegal di wilayah perbatasan.

Maraknya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan, di samping menunjukan lemahnya pengawasan dan tata kelola wilayah perbatasan, juga sekaligus mengindikasikan besarnya potensi ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat jika pengelolaannya dilakukan secara resmi. Berbagai potensi komoditas perkebunan seperti lada, jagung, kelapa sawit, kemudian potensi hasil hutan, tenaga kerja dan perdagangan dapat difasilitasi dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung, seperti jalan, jembatan, pasar, pos lintas batas resmi dan regulasi yang berpihak pada masyarakat lokal. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dan mengurangi angka kemiskinan di wilayah perbatasan.

Kerjasama sosial dan ekonomi antar dua negara di wilayah perbatasan, sebetulnya sudah menjadi tradisi turun temurun. Sebagai dua negara serumpun, terpisahnya dua wilayah akibat pembagian teritorial Indonesia dan Malaysia tetap berlanjut baik secara legal maupun illegal. Di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari PPLB, interaksi masyarakat antar kedua negara cukup intensif bahkan ada banyak warga perbatasan Indonesia yang memiliki kartu Indentitas Malaysia, bekerja di wilayah Malaysia hingga turut

menikmati pelayanan publik di wilayah Malaysia. Pada masa yang akan datang, pemerintah Indonesia dan Malaysia hendaknya tidak lagi menerapkan regulasi-regulasi kaku bagi masyarakat perbatasan dua negara tersebut. Dalam prinsip-prinsip kerjasama yang dilandasi kesepahaman dan kekeluargaan kedua negara mesti bertekad untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga kedua negara melalui kerjasama-kerjasama di bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain-lain.

Jika komitmen yang dibangun antar kedua negara dapat diwujudkan, maka dampak sosialnya akan besar bagi warga perbatasan, terutama dalam membangun kehidupan dan kesejahteraan bersama negara yang bertetangga dekat. Sebagai bangsa yang serumpun, Indonesia dan Malaysia tidak seharusnya menutup rapat perbatasan meskipun sudah hidup dalam kawasan teritorial yang berbeda. Pengalaman Eropa dalam membangun kerjasama unilateral dalam forum Masyarakat Eropa (Uni Eropa), telah mampu mengangkat derajat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Eropa yang masih tertinggal seperti negara-negara yang terletak di Eropa bagian timur. Masyarakat perbatasan yang bertahun-tahun hidup dalam ketertinggalan dan keterisolasian menginginkan persoalan-persoalan birokrasi antar kedua negara tidak lagi berimbas pada kehidupan dan kesejahteraan mereka. Dengan potensi-potensi yang dimiliki, kesejahteraan dan prospek perkembangan perekonomian dapat terwujud dengan kebijakan pembangunan dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertanian dan lain sebagainya.

Pembangunan ekonomi, pelayanan publik, infrastruktur dan ketertiban sosial yang relatif lebih baik di wilayah Malaysia dapat menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan langkah-langkah diplomatik dalam membangun wilayah Indonesia. Pemerintah tidak perlu merasa gengsi karena selama ini perbandingan *output* pembangunan di wilayah kedua negara ini telah merekonstruksi persepsi publik bahwa pemerintah Malaysia lebih berhasil dalam implementasi pembangunan di wilayah mereka. Mirisnya adalah fakta historis bahwa Indonesia lebih dahulu memperoleh kemerdekaan, bahkan pada fase-fase awal pembangunan di wilayah Malaysia, mereka mendatangkan para guru, profesional, dan para pengajar untuk membangun Malaysia. Dengan perencanaan, tata kelola, dan implementasi pembangunan yang lebih baik pada awal tahun 90-an Malaysia mampu menyalip Indonesia dan menjadi wilayah ekonomi baru yang lebih maju dan berkembang.

Kontribusi Pemerintah Malaysia Bagi Warga Perbatasan Indonesia

Menurut pengakuan masyarakat, di wilayah-wilayah perbatasan yang terpencil kontribusi pemerintah dan masyarakat Malaysia cukup tinggi bagi perekonomian masyarakat. Di beberapa wilayah perbatasan Kabupaten Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu yang terpencil banyak di antara masyarakat yang bekerja dan mencari nafkah di wilayah Malaysia. Beberapa juga menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan bahkan kependudukan bagi mereka yang memiliki kartu kependudukan Malaysia. Dalam

hal-hal tertentu pemerintah Malaysia memberi ruang yang cukup bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi dan bekerja di beberapa wilayah Malaysia. Media-media Malaysia seperti radio, televisi dan surat kabar asal negeri jiran tersebut juga dapat diakses dengan mudah oleh warga perbatasan. Hal ini cukup membantu warga perbatasan yang daerah pemukimannya terletak jauh dari pusat-pusat wilayah administratif kecamatan atau kabupaten terdekat. Fasilitas teknologi, informasi dan infrastruktur di wilayah perbatasan Malaysia yang dekat dari jangkauan warga perbatasan Indonesia berkontribusi dalam mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Secara umum mayoritas masyarakat perbatasan berprofesi sebagai petani atau pekebun. Wilayah perbatasan yang topografi wilayahnya sebagian besar didominasi oleh dataran tinggi cukup baik untuk ditanami lada, jagung dan padi. Sudah menjadi cerita umum bahwa komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan tersebut dijual pada para pengusaha asal Malaysia. Sebagai salah satu komoditas yang memiliki harga yang tinggi, lada menjadi primadona yang mampu mensejahterakan para petani perbatasan. Dari beberapa pengakuan warga perbatasan, para bos asal Malaysia bersedia memodali usaha para petani lada tersebut, menyediakan fasilitas kendaraan, dan menampung hasil perkebunan tersebut dengan harga yang tinggi. Pemerintah Malaysia sejauh ini belum terlalu mempermasalahkan berbagai aktivitas tersebut. Alasannya adalah bahwa interaksi antar warga kedua negara di wilayah perbatasan telah berlangsung secara

turun temurun, dan tidak berdampak negatif terhadap kawasan teritorial Malaysia.

Sebagai negara yang relatif lebih makmur, ada banyak warga Indonesia yang menggantungkan nafkah dengan bekerja di berbagai sektor. Umumnya sebagian besar warga Indonesia bekerja di perkebunan-perkebunan, rumah tangga, buruh bangunan dan infrastruktur lain dan sedikit yang bekerja di bidang konsultan, dan menjadi pengusaha. Malaysia dapat dikatakan sebagai solusi dari sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Indonesia. Hal positifnya adalah bahwa, para pekerja asal Indonesia dipersepsikan lebih ulet, rajin, pekerja keras, penurut dan kualitas pekerjaannya di atas rata-rata. Ada banyak para pekerja asal Indonesia yang hidup berkecukupan setelah pulang mengumpulkan ringgit dari Malaysia. Mereka mampu mengumpulkan modal untuk usaha di daerah asalnya, membangun rumah ataupun membeli kendaraan. Inilah mengapa pemerintah Indonesia dianggap perlu untuk membangun sebuah kerjasama yang saling menguntungkan kedua negara dalam kerangka kerjasama yang lebih rill dan memusatkan aktivitasnya di sepanjang wilayah perbatasan kedua negara.

Membangun Kesepahaman Menuju Kesejahteraan Bersama dalam Lingkup Negara Serumpun

Langkah-langkah membangun kesepahaman dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga yang tertinggal dan hidup dalam kemiskinan dan keterisolasian adalah sebagai berikut:

1. Membangun kesepahaman antara kedua negara dalam perjanjian bilateral khusus wilayah perbatasan.
2. Merealisasikan model-model pembangunan yang saling menguntungkan antar kedua negara di wilayah perbatasan negara.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan dan keamanan yang selama ini telah berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan, tingginya angka kemiskinan, timbulnya kesan bahwa masyarakat perbatasan adalah masyarakat yang marginal.
4. Menghindari isu-isu sensitif historis yang dapat melahirkan sikap saling curiga dan persaingan tidak sehat antar kedua negara.
5. Mempromosikan semangat persaudaraan bahwa Malaysia dan Indonesia adalah negara serumpun yang hendaknya saling mendukung satu sama lain.

Sikap saling tidak peduli dan menempatkan wilayah perbatasan kedua negara sebagai prioritas terbawah dalam perencanaan pembangunan sudah seharusnya segera diakhiri. Berbagai upaya pemerintah Indonesia yang mulai melakukan penataan konstruktif di wilayah perbatasan akan berjalan dengan baik dengan dukungan dan kerjasama dengan pihak Malaysia.

Dengan kebijakan yang baik dan konstruktif, wilayah perbatasan dapat didesain menjadi zona strategis dalam bidang perdagangan, industri, pariwisata, transportasi dan kebudayaan. Keberhasilan Batam sebagai wilayah perbatasan dengan Singapura dapat dijadikan rujukan untuk menciptakan situasi yang serupa di perbatasan darat Indonesia dengan Malysia. Batam menjadi destinasi menarik dalam sektor kepariwisataan, industri dan perdagangan karena pihak Singapura juga merasakan manfaat yang besar dari kerjasama dengan pihak Indonesia dalam pengelolaan kawasan perbatasan kedua negara.

Memadukan kesepahaman dengan komunikasi yang intensif antar kedua negara merupakan langkah awal dari prospek pembangunan yang lebih besar pada masa yang akan datang. Wilayah perbatasan adalah masa depan Indonesia, terutama dalam menghadapi globalisasi ekonomi kawasan (MEA) bahkan global. Dengan 3 negara dalam satu kawasan yang saling berdekatan, pos-pos lintas batas tersebut pada akhirnya akan menjadi gerbang dalam mobilitas barang dan manusia antar negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darusalam, hingga negara-negara ASEAN yang lain. Memang saat ini pos-pos lintas batas tersebut masih relatif sepi dan belum menunjukan interaksi ekonomi skala besar, tetapi dengan adanya prioritas dan komitmen yang kuat antar negara, pada masa yang akan datang wilayah-wilayah perbatasan justru akan berbalik menjadi kawasan yang lebih maju dan kesejahteraan masyarakatnya menjadi meningkat.

Analisis Peluang dan Tantangan Kerjasama Indonesia-Malaysia di Wilayah Perbatasan

a. Peluang

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sejauh ini telah membuka diri untuk saling bekerja sama dalam berbagai sektor. Jika dianalisis kerjasama terbesar masih dalam bidang perlindungan dan penempatan pekerja migran asal Indonesia, bidang pendidikan, pariwisata dan kebudayaan. Anehnya, dalam bidang perekonomian kedua negara yang hidup dalam wilayah yang relatif dekat justru tidak mengembangkan kerjasama di bidang ekonomi dalam skala besar. Indonesia justru mencatat transaksi perdagangan yang cukup besar dengan negara-negara yang secara geografis terletak jauh seperti Eropa, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea bahkan Afrika.

Sebagai dua negara yang memiliki kapasitas perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara, kerjasama perekonomian Indonesia-Malaysia berpeluang untuk menjadi kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia. Hal ini karena sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia dan Malaysia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sektor pertanian, kehutanan, kelautan, pertambangan, minyak dan gas (migas) dan pariwisata seharusnya cukup untuk memakmurkan kehidupan warga kedua negara. Fenomena kemiskinan yang cukup besar di Indonesia menandakan adanya kesalahan dalam sistem

pelaksanaan pembangunan. Dengan komitmen dan kerja keras, berbagai peluang tersebut dalam terwujud dalam realisasi kerjasama pembangunan dan industri yang mampu menyerap tenaga kerja, menyediakan kebutuhan masyarakat dengan biaya murah dan modernisasi dalam teknologi pengelolaan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan pariwisata.

b. Tantangan

Dinamika politik global seringkali menjadi penghambat realisasi kerjasama yang baik di antara kedua negara. Pihak Malaysia tampak berhati-hati dalam membangun kesepakatan-kesepakatan dalam kerangka kerjasama bilateral di bidang ekonomi, investasi dan teknologi dengan Indonesia. Hal tersebut mungkin disebabkan oleh masih rendahnya kepercayaan publik maupun pemerintah Malaysia terhadap kemampuan Indonesia dalam mengelola kerjasama ekonomi. Banyaknya kasus korupsi, kepastian hukum yang rendah, politisasi birokrasi, stabilitas politik yang menurun, serta adanya sentimen anti-Malaysia dalam beberapa kelompok masyarakat Indonesia menjadi tantangan yang perlu untuk diatasi melalui kesepahaman dan diplomasi yang intensif.

Selain itu, tekanan dari negara-negara “Patron” menjadikan pihak Indonesia sulit untuk berinovasi dan mengelola sendiri potensi-potensi yang dimilikinya. Hingga

saat ini sektor pertambangan, industri, teknologi dan otomotif hingga 70% masih dikuasai oleh negara-negara besar. Hal ini menimbulkan keraguan dari pihak Malaysia bahwa kehadiran mereka dalam perekonomian akan menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari minimnya investasi Malaysia dalam bidang pertambangan, migas, industri, teknologi dan lain-lain. Wilayah-wilayah investasi tersebut justru didominasi oleh Jepang, Korea, Cina, Eropa dan Amerika Serikat.

Kesimpulan

Ada banyak sektor yang prospektif di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kedua negara. Beberapa sektor prospektif tersebut adalah bidang ekonomi dan perdagangan, pembangunan, kehutanan dan pertanian, kepariwisataan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan membangun kesepahaman sebagai negara serumpun dan secara geografis sangat dekat, maka diharapkan kondisi sosial, ekonomi, pembangunan, budaya dan kesejahteraan secara umum dapat lebih ditingkatkan. Kerjasama bilateral yang diharapkan oleh warga di perbatasan kedua negara lebih pada terbitnya regulasi yang mempermudah akses transportasi, mobilitas barang dan orang, serta kerjasama kedua negara di berbagai bidang pada zona-zona wilayah perbatasan. Jika ini dapat direalisasikan dengan baik, maka wilayah perbatasan akan tumbuh menjadi wilayah yang berkembang, maju dan modern serta akan berdampak positif pula pada kesejahteraan warga di perbatasan kedua negara.

Daftar Pustaka

Alisjahbana, Arminda S. dkk. 2007. *Indonesia dan Malaysia dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi.* Bandung : Universitas Padjadjaran

Bangun, Budi Hemawan. 2014. *Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara di Kalimantan Barat-Sarawak (Pusat Studi Perbandingan).* Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Budianta, Aziz. 2010. *Pengembangan Wilayah Perbatasan Sebagai Upaya Pemerataan Pembangunan Wilayah di Indonesia.* Palu: Jurnal SMARTek.

Niko, Nikodemus. 2016. *Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Human Trafficking di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat.* Jakarta: Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPACT.